# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Tinjauan Pustaka

### 2.1.1 Hubungan Internasional

Perkembangan dalam Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin ilmu termasuk yang mengalami perkembangan tercepat. Pada awalnya sekitar abad ke-19, disiplin ilmu Hubungan Internasional hanya memfokuskan kepada aktor negara saja, dan mengesampingkan aktor non-negara seperti perusahaan multi nasional, organisasi non-pemerintah, gerakan sosial, bahkan individu (Hadiwinata, 2007: 4).

Secara terminologi, Hubungan Internasional adalah sebuah interaksi yang terjadi melintasi batas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dengan segala kepentingannya dan ada sejumlah kebijakan yang berlaku dalam mengatur hubungan tersebut. Pada awal keberadaannya, pembahasan dan aktor dalam menjalin suatu hubungan dengan negara lain cenderung *high politic* dan tertutup. Hubungan internasional adalah studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi di antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahan (Couloumbis dan Wolfe, 2004: 24).

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

> “Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interpendensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Menurut *The Dictionary of World Politics*, hubungan internasional adalah istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara. Sedangkan Mc. Clelland mendefinisikan hubungan internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia (Perwita & Yani, 2005: 4).

Kemudian Mochtar Mas’oed lebih jauh menjelaskan dalam buku : *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* bahwa :

> *"*tujuan utama studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku internasional, yakni perilaku para aktor negara maupun non negara dalam area transaksi internasional. Perilaku itu dapat berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya "(Mas’oed, 2002:29).

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional ini mengalami banyak perkembangan. negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu

internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan (Hadiwinata, 2007: 5).

Bidang sosial dan kebudayaan dapat masuk kedalam kajian ilmu hubungan internasional karena dalam penelitian ini hal yang dikaji adalah prioritas Jerman dalam meningkatkan pertukaran pendidikan dari Indonesia ke Jerman dan pengaruh penyebaran kebudayaan serta bahasa Jerman terhadap aspek sosial di Indonesia. Dan *Goethe-Institut* berperan sebagai aktor yang menjembatani hubungan internasional di antara kedua negara tersebut.

### 2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2002: 116).

Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan atau politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi suatu negara, karena mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara,

kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, kesejateraan dan ekonomi (Plano & Olton, 2000: 7).

Eksistensi suatu negara akan tetap berlangsung selama tercapainya kepentingan-kepentingan negaranya. Kepentingan-kepentingan negara tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dalam satu ruang lingkup domestik saja, akan tetapi melalui kerangka hubungan antar negara. Ide kepentingan nasional mengacu pada perangkat ideal dari tujuan-tujuan nasional yang harus ditemukan sebagai dasar dari hubungan luar negeri dan politik luar negeri negara tersebut. Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintahan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional (Plano & Olton, 2000: 7).

### 2.1.3 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan pemerintah untuk mengatur semua hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan negara lain.

Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri suatu negara, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif, seperti kebijakan untuk menetukan suatu strategi (Suryokusumo, 2004:7-8).

Maka dengan demikian hubungan internasional merupakan forum interaksi dari berbagai kepentingan-kepentingan nasional. Dalam interaksi itu pula setiap negara berupaya menegakkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya

dalam forum interaksi masyarakat internasional yakni dengan melalui kebijaksanaan politik luar negeri masing-masing.

Dalam menjalankan politik luar negeri, hubungan internasional menjelaskan beberapa pendekatan, yang salah satunya adalah pendekatan pemikiran strategis suatu negara atau pendekatan adaptif, salah satu tokoh pemikirnya adalah James N. Rosenau. Berkaitan juga dengan politik luar negeri yang dirumuskan oleh Perancis berdasarkan keadaan geopolitik Indonesia. Bahwa menurut teoritisi pendekatan ini lingkungan akan menimbulkan akibat-akibat khusus, terlepas dari tindakan apa yang dilakukan oleh negara tersebut, model ini akan memisahkan perkiraan kapabilitas yang dimiliki oleh sebuah negara dengan posisi geopolitiknya, keadaan geografis dan sebagainya. Menurut Rosenau politik luar negeri merupakan suatu mekanisme interaksi negara-negara dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Kondisi sebuah negara akan mempengaruhi politik luar negerinya. Negara yang memiliki lingkungan strategis pasti akan memiliki politik luar negeri yang berbeda, begitu juga dengan keadaan negara tujuan dimana politik luar negeri tersebut dilaksanakan, akan mempengaruhi perumusan politik luar negeri negara lain (Perwita & Yani, 2005: 62-63).

Ada beberapa langkah atau tahapan yang dilakukan oleh sebuah negara dalam proses politik luar negerinya. Langkah-langkah tersebut antara lain, pertama sebuah negara akan menetapkan semua tujuan dan kemana arah politik luar negerinya, serta mengumpulkan data-data penting seperti bagaimana kemampuan negaranya, kondisi dunia luar saat ini dan lainnya, tahap kedua adalah perumusan kebijakan dalam politik luar negeri untuk dapat mencapai

tujuan nasionalnya, biasanya hal ini akan dipengaruhi oleh faktor dalam negeri. Tahap selanjutnya yang dilalui oleh sebuah negara adalah keluarnya suatu kebijakan yang nantinya akan diterapkan, dimana dalam kebijakan tersebut terdapat serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebuah negara. Berikutnya negara akan melaksanakan politik luar negeri berdasarkan pada rumusan yang telah dibuatnya, hal ini dilakukuan dengan cara berhubungan dengan dunia luar, maka pasti akan muncul kemampuan baru sebuah negara dan tujuan lain yang hendak dicapai kembali, yang kemudian akan kembali pada proses awal yaitu *information assessment* (Perwita & Yani, 2005:60).

Politik luar negeri suatu negara ditunjukan untuk memajukan dan melindungi kepentingan negara itu. Fungsi utama diplomasi juga, adalah untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Dari situlah maka politik luar negeri dan diplomasi memiliki fungsi yang sama. Namun ada beberapa perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Di dunia yang terdiri dari banyak bangsa ini, untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional, setiap bangsa harus menentukan sikapnya terhadap bangsa lain dan arah tindakan yang akan diambil dan dicapai dalam urusan internasional. Pada saat dasar ini diletakan dan politik luar negeri dirumuskan, maka munculah peranan diplomat untuk melaksanakan keputusan itu dengan kegiatan-kegiatannya. Jadi apabila fungsi utama politik luar negeri adalah mengambil keputusan mengenai hubungan luar negeri maka tugas utama diplomasi adalah untuk melaksanakanya dengan baik dan efektif (Roy, 1991:34).

### 2.1.4 *Soft Power*

Konsep *soft power* pertama kali diperkenalkan oleh Joseph S. Nye di tahun 1990. Konsep *power* sendiri menurut Nye adalah kemampuan dalam hal mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Terdapat tiga cara dalam mengeksekusi *power*, yaitu: memaksa lewat ancaman, membujuk dengan memberikan bayaran, atau yang terakhir dengan menarik perhatian atau memikat hati. Dua yang pertama dinamakan *hard power*, yakni ditandai dengan penggunaan kekuatan militer maupun ekonomi, sedangkan yang ketiga disebut dengan *soft power*. Nye mendefinisikan *soft power* sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang lain dengan cara memunculkan ketertarikan (*attraction*) dibandingkan melakukan paksaan (*coercion*) atau bayaran (*payments*). *Soft power* ini terletak pada kemampuan suatu pihak dalam membentuk preferensi pihak lain (Nye, 2004: 46).

*Soft power* yang dimiliki oleh suatu negara, pada dasarnya, bergantung pada tiga sumber utama, yakni: budaya (dimana orang merasa tertarik terhadapnya), nilai-nilai politis/*political values* (ketika orang merasakannya, baik itu di dalam maupun luar negeri), dan terakhir kebijakan luar negeri (ketika orang melihatnya sebagai suatu legitimasi dan mempunyai otoritas moral). Budaya adalah kumpulan nilai-nilai dan kebiasaan (praktek) yang mempunyai arti bagi sebuah masyarakat. Budaya memiliki banyak manifestasi, dan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *high culture*, seperti sastra, seni, dan edukasi yang biasa ditujukan bagi kalangan elit; dan *popular culture* yang diperuntukkan bagi masyarakat secara umum (massal). Apabila budaya suatu negara memiliki nilai

universal serta mempromosikan *values* dan *interest* yang di-*share* bersama, maka budaya tersebut dapat meningkatkan *desired outcomes*-nya karena daya tarik yang tercipta (Nye, 2004: 73).

Mempromosikan *image* positif suatu negara bukanlah sesuatu yang baru. Namun di era sekarang, kondisi untuk merancang sebuah *soft power* telah mengalami transformasi, begitu juga dengan konteks internasional yang telah berubah dengan revolusi informasi dan globalisasinya. Nye berargumen bahwa konteks sangat menentukan dampak dan hasil suatu *soft power*, terlepas dari sumber mana *soft power* tersebut berasal. Dan memang dibandingkan dengan *hard power*, *soft power* lebih banyak bergantung pada konteks, dan terhadap adanya kemauan dari sang penerima (*receiver*). Oleh karenanya, *soft power* tidaklah konstan, namun sesuatu yang dapat berubah-ubah berdasarkan waktu, tempat, dan kondisi (Nye, 2004: 51).

### 2.1.5 Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional. Dalam pendekatan tradisional, diplomasi didefenisikan sebagai sebuah seni bernegosiasi dengan negara lain. Diplomasi menjadi salah satu instrumen bagi politik luar negeri untuk dapat mencapai tujuan dan atau kepentingan nasionalnya. Salah satu tugas utama diplomasi adalah berusaha untuk menerapkan keinginan dan pikiran suatu pemerintah dan bangsa pada keinginan masyarakat negara yang didekati. Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih (Djelantik, 2008: 113).

Diplomasi menurut Geoff Berridge dan Alan James adalah penyelenggaraan hubungan antara negara-negara yang berdaulat melalui diplomat untuk mempromosikan negosiasi internasional (Berridge dan James, 2012: 69). Secara konvensional, pengertian diplomasi adalah usaha suatu negara dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional (Roy, 1991: 9). Globalisasi dan revolusi teknologi yang terjadi dewasa ini telah membawa konsekuensi langsung pada praktek diplomasi. Revolusi teknologi yang menandai lahirnya abad ke-21 secara mendasar telah merubah tatanan dunia (Djelantik, 2008: 353).

**2.1.5.1 Diplomasi Publik**

Diplomasi publik dalam buku *public diplomacy* karya Mark Leonard mengatakan bahwa diplomasi publik merupakan sebuah cara untuk membangun hubungan dengan cara memahami kebutuhan, budaya, dan masyarakat; mengomunikasikan pandangan; membenarkan mispersepsi yang ada dalam masyarakat internasional; mencari area dimana pemerintah dapat menemukan kesamaan pandangan (Leonard, 2002: 8).

Konsep diplomasi publik dapat dilihat dari sisi publik sebagai objek dan subjeknya. Publik sebagai objek, dalam artian publik di negara lain adalah objek atau tujuan dari diplomasi negara. Sedangkan publik sebagai subjek dalam artian publik di tataran domestik ikut serta dalam aktifitas diplomasi negara atau pemerintah (Effendi, 2013: 49).

Implementasi dari diplomasi publik yang dilakukan oleh sebuah negara tentunya berbeda-beda. Diplomasi Publik merupakan kunci dalam implementasi

apa yang disebut dengan *Soft Diplomacy* menjadi alat utama diplomasi sekarang ini. Perkembangan diplomasi di era globalisasi menjadikan Diplomasi Publik itu sendiri semakin beragam. Kecenderungan pelaksanaan Diplomasi Publik dengan menggunakan aplikasi *Soft Diplomacy* dianggap efektif dan efisien karena mudah untuk dilakukan tanpa menelan korban dan menghabiskan biaya besar. Seiring berubahnya paradigma aktor hubungan internasional, pelaksanaan Diplomasi Publik melibatkan berbagai kalangan aktor non-Pemerintahan. Oleh karena itu, *Soft Diplomacy* merupakan bentuk nyata dari penggunaan instrumen selain tekanan politik, militer, dan tekanan ekonomi. Maka dari itu, konsep politik luar negeri dilakukan melalui diplomasi publik (Yudhantara, 2011:183).

Diplomasi publik bertujuan menumbuhkan opini masyarakat yang positif di negara lain melalui interaksi dengan kelompok-kelompok kepentingan. Oleh karena itu, diplomasi publik mensyaratkan kemampuan komunikasi antarbudaya karena terkait dengan perubahan sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan-persoalan politik luar negeri. Di era informasi, pendapat masyarakat dapat secara efektif mempengaruhi tindakan pemerintah (Djelantik, 2004: 353).

### 2.1.5.2 Diplomasi Kebudayaan

Definisi dari diplomasi budaya adalah sebagai sebuah pertukaran ide, informasi, seni, serta aspek kebudayaan lainnya dengan tujuan untuk menjaga sikap saling pengertian antara satu negara dengan negara lain maupun antar masyarakatnya (Cummings, 2003:1). Pendapat lain dari Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari dalam bukunya yang berjudul *Diplomasi : Konsep dan*

*Relevansi bagi Negara Berkembang, Studi Kasus Indonesia*, mendefinisikan diplomasi Kebudayaan sebagai berikut :

> "Diplomasi kebudayaan adalah usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya propaganda, dll, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer. Beberapa literatur menyebutnya dengan propaganda" (Warsito & Kartikasari, 2007:4).

Kegiatan yang dilakukan untuk tujuan diplomasi kebudayaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat, individu-individu, termasuk warga negara. Lebih lanjut Warsito dan Kartikasari mengelompokkan diplomasi kebudayaan menjadi dua, yaitu diplomasi kebudayaan makro dan diplomasi kebudayaan mikro.

Secara umum kebudayaan makro yang diungkapkan oleh Warsito dan Kartikasari adalah segala hasil dan upaya budidaya manusia terhadap lingkungan, sehingga dapat diartikan kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dapat dipelajari untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Sedangkan diplomasi kebudayaan mikro merupakan hasil dari diplomasi kebudayaan makro, berupa pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga dan kesenian (Warsito dan Kartikasari, 2007:2-19). Terdapat beberapa tujuan dari diplomasi kebudayaan yaitu:

1. Tujuan diplomasi kebudayaan lebih luas dari pada pertukaran kebudayaan, misalnya mengirim utusan ke luar negeri untuk memperkenalkan kebudayaan satu negara ke negara lain.
2. Membangun pengetahuan baru dan kepekaan terhadap negara lain untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dengan bangsanya.
3. Mempengaruhi pendapat masyarakat negara lain guna mendukung suatu kebijakan luar negeri tertentu.

Diplomasi budaya tergolong dalam bahasan *Soft Power* sebagai suatu kekuatan politik yang dipengaruhi budaya, nilai, ide sebagai sisi lain dari *hard power* yang menggunakan kekuatan militer.

Terdapat tiga kriteria mengapa diplomasi budaya menjadi nilai penting dalam teori hubungan internasional. Pertama, untuk mengurangi intensitas kekuatan militer pasca perang dingin, budaya dipandang sebagai sebuah bentuk kekuatan baru dalam hubungan internasional.

Kedua, setiap Negara bangsa juga harus membangun dasar dan batas jaringan nonsekuritas dalam hal mempertahankan identitas bangsa. Budaya yang terdiri dari berbagai aspek menjadi identitas suatu Negara di mata internasional.

Ketiga, diplomasi budaya juga bisa menjadi alasan kuat dalam hal membentuk sebuah sistem internasional baru, baik berupa organisasi regional maupun global.

Kemudian Warsito menjelaskan konsep-konsep diplomasi kebudayaan, dilihat dari bentuk, tujuan dan sarana nya, adalah sebagai berikut :

1. Eksibisi atau pameran merupakan bentuk diplomasi paling konvensional mengingat gaya diplomasi modern adalah diplomasi secara terbuka.
2. Propaganda, merupakan penyebaran informasi mengenai kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun nilai-nilai sosial ideologis suatu bangsa.
3. Kompetisi, berupa olahraga, kontes kecantikan, ataupun kompetisi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.
4. Penetrasi, merupakan salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan melalui bidang-bidang perdagangan, ideologi, dan militer.
5. Negosiasi, dalam lingkungan budaya negosiasi dilakukan sebelum negosiasi tersebut dilaksanakan, karena lingkungan budaya tersebut akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan dalam suatu negosiasi yang akan dilaksanakan.
6. Pertukaran Ahli, merupakan salah satu jenis dari hasil negosiasi. Pertukaran ahli mencakup masalah kerjasama pertukaran budaya secara luas, yakni dari kerjasama beasiswa antar negara, sampai dengan pertukaran ahli dalam bidang tertentu (Warsito & Kartikasari, 2013 : 37-38).

Sarana diplomasi dibagi menjadi dua, yaitu, infrastruktur yang meliputi Elektronik, audio visual, dan media cetak dan suprastruktur yang meliputi Pariwisata, para militer, pendidikan, kesenian, perdagangan, opini publik, dan olahraga. Sedangkan cara diplomasi kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung melalui kesepakatan bilateral, multilateral, konvensi internasional, dan secara tidak langsung, melalui negara ketiga atau melalui lembaga internasional. Dari segi tujuan, diplomasi kebudayaan ini biasanya bertujuan untuk mencari

pengakuan, penyesuaian, bujukan, hegemoni atau subversi. Melalui tujuan-tujuan tersebut, saran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan diplomasi tersebut adalah melalui pariwisata, olahraga, pendidikan, perdagangan, dan juga kesenian. (Warsito & Kartikasari, 2013 : 21-20).

Kemudian, dijelaskan pula ada dua pendekatan yang dipakai oleh negara-negara berkembang dalam hubunganya terhadap kebudayaan modern dunia, yaitu yang pertama melaui konsep bipolaritas, atau dikotomi global dalam hal ini kebudayaan modern dunia yang digolongkan hanya dalam 2 (dua) kelompok, yakni maju dan berkembang, atau modern dan tradisional. Bahwa posisi negara yang sedang berkembang berada dibawah negara-negara maju, sehingga terdapat ketergantungan antara negara berkembang terhadap negara maju untuk men sejajarkan posisinya. Yang kedua, pendekatan Spektrum Perkembangan Kebudayaan, menjelaskan bahwa pusat kebudayaan modern di negara yag sedang berkembang sesungguhnya merupakan budaya dari pinggiran yang berpola kepada pusat-pusat budaya modern dunia (Warsito & Kartikasari, 2007 : 33-35).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional mencakup interaksi yang dilakukan oleh aktor suatu negara dalam kehidupan antarnegara. Adanya saling ketergantungan dari kedua negara Jerman dan Indonesia mendorong adanya kerjasama seperti yang didelegasikan dalam kesepakatan bilateral kedua negara, hendaknya kerjasama tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jerman memiliki pengaruh terhadap Indonesia melalui *Goethe-Institut* untuk menyebarluaskan bahasa Jerman dan mempengaruhi budaya Jerman di Indonesia, dan bagi Indonesia dengan

kesempatan *study* ke Jerman dapat meningkatkan intelektual mereka sehingga dapat membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.

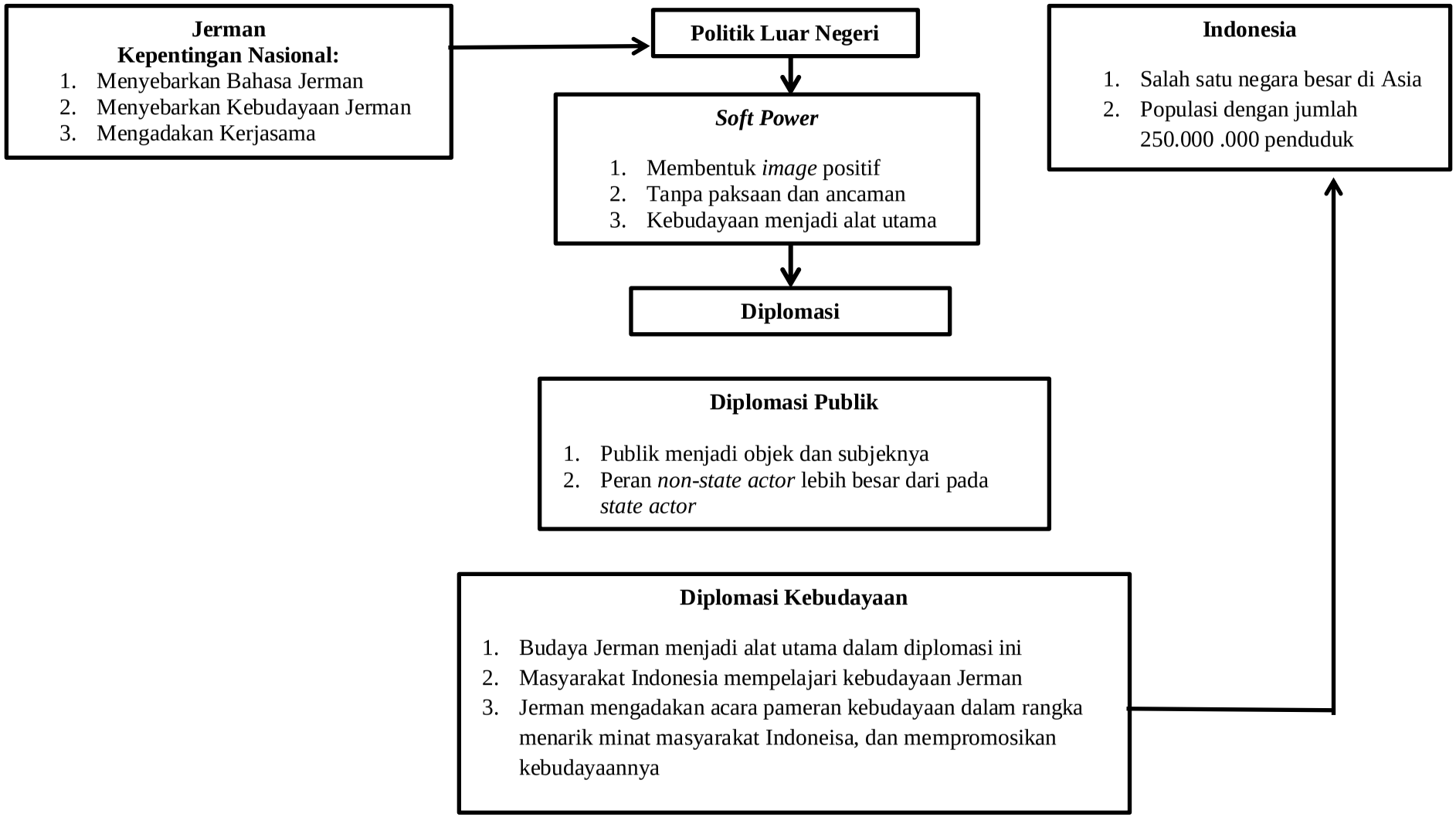
Suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain karena dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya, salah satunya adalah Jerman. Kepentingan nasional Jerman dalam bidang budaya diantaranya adalah untuk menyebarkan bahasa Jerman, menyebarkan kebudayaan Jerman, dan mengadakan kerjasama dalam bidang kebudayaan dengan negara lain. Dalam memenuhi kepentingan nasional tersebut, Jerman menjadikan *Goethe-Instiute* sebagai institusi resmi yang digunakan untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut.

Sejak tahun 1970 pilar kebudayaan menjadi prioritas dalam politik luar negeri Jerman. Sehingga sampai saat ini *Goethe-Instiute* yang memiliki tugas menyebarkan kebudayaan Jerman tersebar di 92 negara. Hal tersebut menunjukan keseriusan Jerman dalam menjadikan pilar budaya sebagai salah satu prioritas dalam politik luar negerinya. Dalam menjalankan politik luar negerinya, Jerman menggunakan *Soft Power* dimana *Goethe-Instiute* berperan meningkatkan ketertarikan masyarakat Indonesia dalam mempelajari budaya Jerman tanpa ada paksaan sama sekali. Hal tersebut tercermin dari semakin meingkatnya masyarakat Indonesia yang belajar bahasa Jerman di *Goethe-Institute*, semakin meningkatnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh *Goethe-Institute* seperti *screening* film Jerman, pertunjukan musik, pameran seni, dan kegiatan budaya lainnya.

Dalam penelitian ini jika ditinjau dari teori diplomasi, bahwa yang menjadi dasar suatu diplomasi adalah politik luar negeri Jerman yang membuat kebijakan

eksternal kebudayaan kemudian kebijakan tersebut di implementasikan terhadap hubungan bilateral Jerman dan Indonesia kemudian terjadi negosiasi antara para *state actor* untuk membicarakan mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut. Sehingga lebih jauhnya *Goethe-Institut* yang merupakan lembaga dijadikan sebagai sarana diplomasi tersebut.

Apabila dilihat dari subjek dan objeknya, diplomasi yang dilakukan Jerman melalui *Goethe-Institut* termasuk kedalam diplomasi publik. Dalam diplomasi publik yang menjadi subjek dan objeknya adalah publik atau masyarakat secara umum, dimana peran publik atau individu lebih dominan bila dibandingkan dengan peran pemerintah. Dan diplomasi publik pun merupakan kunci dalam implementasi apa yang disebut dengan *soft power*. Melalui *Goethe-Institut*, Jerman dan Indonesia menjalankan praktek diplomasi budaya, dimana diantara kedua negara ini telah terjadi pertukaran ide, informasi, seni, serta aspek kebudayaan lainnya. Masyarakat Indonesia mempelajari budaya Jerman seperti bahasa, seni, musik, film, dan lainnya. Jerman pun melalui *Goethe-Institut* mengadakan acara-acara pameran kebudayaan untuk menarik minat masyarakat Indonesia dan mempromosikan kekayaan kebudayaannya.




Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran